

Mahkota II Siap Diaudit

SAMARINDA – Meski dipastikan bakal mendapatkan subsidi dari APBD-P¹ Provinsi 2012, Pemkot belum tahu persis berapa angka yang akan dikucurkan untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Mahkota II.

Wakil Wali Kota Samarinda, Nusyirwan Ismail, menyambut baik bantuan itu. Mengenai permintaan agar proyek ini diaudit terlebih dahulu sebelum mendapat bantuan, Nusyirwan menyatakan kesiapan Pemkot.

Dia mengatakan, Pemkot siap jika Mahkota II harus diaudit², mengingat usia pembangunan yang nyaris sepuluh tahun hingga sekarang tak kunjung rampung. Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiap tahunnya juga selalu mengaudit proyek Pemkot.

Pembangunan jembatan yang di gadang-gadang termegah di Kaltim ini diduga sudah melampaui pembayaran. Nusyirwan menyatakan hal itu sah-sah saja karena Mahkota II dikerjakan di bawah kontrak tahun jamak³. Dengan demikian, tak menutup kemungkinan subsidi provinsi itu digunakan untuk membayar tunggakan. “Saya rasa tak ada masalah kontraktor menyelesaikan kegiatan multiyears, ketika rampung baru dibayar,” jelasnya.

Nusyirwan mengakui pembangunan Mahkota II itu bakal menggelembungkan estimasi anggaran, sebab Mahkota II sudah dibangun sejak 2003. Apalagi harga material pembangunan ketika itu berbeda dengan sekarang. Meski begitu, estimasi anggaran pembangunan Mahkota II tetap sesuai aturan. “Pemkot selalu transparan mengenai anggaran,” sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Rusmadi, membeberkan, jika pembangunan Mahkota II telah diusulkan di APBD-P Provinsi 2012. Untuk jumlahnya, masih menunggu persetujuan DPRD Kaltim.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Andi Harun, meminta Pemprov lebih dahulu mengaudit proyek tersebut. Bantuan keuangan dari provinsi kepada Samarinda, jelasnya, dikhawatirkan digunakan untuk membayar tunggakan dari pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor.

“Belajar dari pengalaman, Pemkot Samarinda pernah mengalihkan bantuan keuangan tanpa persetujuan provinsi”, kata politisi Partai Patriot ini. (*rom/wan)

Sumber berita : *Kaltim Post*, Rabu, 25 Juli 2012, Halaman 6.

¹**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:** Disingkat APBD; Merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

²**Audit:** Pemeriksaan terhadap pembukuan tentang keuangan perusahaan, bank, aparatur negara, dan sebagainya yang dilakukan secara berkala.

³**Kontrak Tahun Jamak:** Suatu bentuk kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, atau Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD provinsi.

JDIH BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR